



SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan Pelaksanaan FKP	4
3. Ruang Lingkup	4
BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP	6
1. Sumber Input dan Tema FKP	6
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
3. Penyelenggara dan Peserta FKP	5
4. Metode Pelaksanaan FKP	7
BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Analisis	8
3. Rencana Aksi	9
BAB IV. PENUTUP	11
LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	12
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR	13
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN	14
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN	15
LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA	16

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

2. Tujuan Pelaksanaan FKP

Tujuan dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, antara lain:

- a. Menggali dan memetakan tantangan serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan pengguna layanan dalam mengakses Standar Pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, khususnya pada aspek Persyaratan, Waktu Pelayanan, dan Produk Layanan.
- b. Menyusun rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah strategis bersama pemangku kepentingan untuk menyelaraskan Standar Pelayanan sesuai dengan kebutuhan publik serta Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2026.
- c. Membangun komitmen dan sinergi pengawasan antara Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Sekretariat DPRD) dengan perangkat daerah/stakeholder terkait dalam memantau dan mengawal progres tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan.

3. Ruang Lingkup

Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul membahas mengenai kondisi eksisting penerapan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2026, yang mencakup Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja, Pemberhentian Antarwaktu (PAW) dan/atau Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD, serta Keprotokoleran Sekretariat DPRD. Diskusi difokuskan pada penjangkaran aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait kemudahan aksesibilitas publikasi Produk Hukum (Risalah Rapat), pengaturan persyaratan administrasi bagi tamu kunjungan kerja luar daerah, keterbukaan informasi alur pembahasan Peraturan Daerah (Perda), hingga efisiensi waktu pelayanan yang berkaitan erat dengan penjadwalan melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Melalui pembahasan menyeluruh ini, FKP menghasilkan matriks rekomendasi perbaikan beserta penetapan jangka waktu penyelesaiannya pada Tahun Anggaran 2026.

Didasarkan pada diskusi yang telah dilakukan, diharapkan ke depannya masyarakat dan seluruh pengguna layanan dapat mengakses informasi serta

layanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul secara lebih cepat, terbuka, transparan, dan mudah dipahami, sekaligus memastikan produk pelayanan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara optimal.

BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP

1. Sumber Input dan Tema FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul mengambil tema "Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026". Tema tersebut diangkat berdasarkan pengolahan data dan informasi dari hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026 yang menunjukkan dibutuhkan penanganan dan perbaikan pada tiga unsur pelayanan dengan rerata skor terendah, yaitu Persyaratan (U1), Waktu Pelayanan (U3), dan Produk Layanan (U5).

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Selasa

Tanggal : 8 September 2026

b. Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik Evaluasi Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Bantul

3. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Kegiatan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan oleh Bagian Umum,

b. Peserta FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dihadiri oleh peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders) yang meliputi :

- 1) Pejabat struktural dan pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
- 2) BPKPAD Kabupaten Bantul
- 3) Bappeda Kabupaten Bantul
- 4) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul
- 5) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Bantul
- 6) Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

7) Mahasiswa

4. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka.

BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan masukan yang diberikan oleh peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, terdapat beberapa permasalahan utama terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Pertama, publikasi persyaratan dan standar layanan dirasa belum optimal dan belum menjangkau calon tamu atau pengguna layanan secara luas. Calon tamu kunjungan kerja dari luar daerah kerap mengalami kendala keterbatasan informasi administrasi diawal, serta adanya isu kejelasan regulasi terkait kewajiban menginap di wilayah Kabupaten Bantul. Kedua, keterbukaan dan aksesibilitas dokumen publik masih terbatas, terutama dalam kemudahan pencarian Produk Hukum seperti Risalah Rapat DPRD serta transparansi informasi mengenai alur dan proses pembahasan Peraturan Daerah (Perda) yang sedang berjalan. Ketiga, durasi waktu penyelesaian layanan dirasa masih terlalu lama, yang mana hal ini sangat dipengaruhi oleh ketergantungan pada mekanisme penjadwalan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD yang saat ini dinilai perlu dievaluasi agar dapat dilaksanakan secara lebih fleksibel.

2. Analisis

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menunjukkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93,19 dengan kategori "Sangat Baik". Namun demikian, hasil pemetaan per unsur layanan mengidentifikasi adanya tiga unsur dengan skor rerata terendah, yaitu Persyaratan (U1) sebesar 3,70, Waktu Pelayanan (U3) sebesar 3,66, dan Produk Layanan (U5) sebesar 3,66. Ketiga unsur ini menjadi perhatian utama mengingat responden didominasi oleh kelompok masyarakat usia produktif (25–35 tahun) sebesar 31,97% serta berpendidikan tinggi (S-1) sebesar 62,21%, yang memiliki ekspektasi serta kecermatan tinggi terhadap transparansi dan kecepatan pelayanan publik. Sesuai dengan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) yang telah diselenggarakan, ditemukan beberapa kendala teknis dan tata kelola yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap ketiga unsur tersebut. Pada unsur Persyaratan (U1) dan Produk Layanan (U5), pemohon layanan khususnya calon tamu kunjungan kerja dari luar daerah kerap mengalami kesulitan dalam mengakses informasi syarat

administrasi serta dokumen publik seperti Risalah Rapat DPRD dan keterbukaan alur pembahasan Peraturan Daerah (Perda). Untuk mengatasi hal tersebut, disepakati langkah pembenahan melalui penyebaran dokumen Standar Pelayanan sesuai Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2026, penambahan regulasi khusus bagi tamu luar daerah, penerbitan fitur Frequently Asked Questions (FAQ), serta penyampaian Risalah Rapat dan progres pembahasan Perda secara lengkap pada media publikasi resmi. Langkah transparansi ini penting agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebelum mengajukan permohonan layanan. Sementara itu, pada unsur Waktu Pelayanan (U3), kelambatan proses penyelesaian layanan sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas mekanisme penjadwalan di tingkat internal.

Dalam diskusi FKP terungkap bahwa pelaksanaan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD yang menjadi penentu jadwal kegiatan kerja dirasa perlu dievaluasi. Sebagai solusi perbaikan, direkomendasikan agar penjadwalan Banmus DPRD dapat dilaksanakan lebih dari satu kali jika dimungkinkan, sehingga proses koordinasi lintas unit maupun penelaahan aspirasi/konsultasi dapat berjalan lebih cepat dan memiliki kepastian waktu yang jelas bagi pengguna layanan. Seluruh rekomendasi perbaikan ini ditargetkan tuntas pada Tahun Anggaran 2026 dengan pengawasan berkala oleh para pemangku kepentingan.

3. Rencana Aksi

Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Evaluasi Pelayanan Publik Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul merencanakan beberapa tindakan perbaikan yang seluruhnya ditargetkan tuntas pada Tahun Anggaran 2026. Pertama, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul akan mempublikasikan secara lengkap Produk Hukum (Risalah Rapat) serta menginformasikan proses dan alur pembahasan Peraturan Daerah (Perda) yang sedang dilaksanakan melalui media publikasi resmi guna meningkatkan transparansi informasi publik.

Kedua, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul akan membagikan dokumen Standar Pelayanan kepada calon tamu, menambahkan fitur Frequently Asked Questions (FAQ) pada website resmi, serta menambah persyaratan administrasi khusus bagi tamu kunjungan kerja dari luar Kota/Kabupaten. Terakhir, untuk

mengatasi kendala keterlambatan waktu pelayanan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul merekomendasikan dan mendorong pelaksanaan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD agar memungkinkan untuk dilaksanakan lebih dari satu kali demi mempercepat kepastian penjadwalan layanan.

BAB IV. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026 ini, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk :

1. Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
2. Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
3. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat membantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul mengembangkan pelayanan publik yang lebih baik.

LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DPRD

Jl. Jendral Sudirman Nomor 85 Bantul 55711 Telp. (0274) 367417 Fax. (0274) 367200
Pos-el: sekwan.bantul@bantulkab.go.id laman: <http://dprd.bantulkab.go.id>

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) EVALUASI PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL

Pada Hari ini, Selasa, 8 September 2026 telah dilaksanakan **Forum Konsultasi Publik** Evaluasi Pelayanan Publik sebagai tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama, menyatakan sebagai berikut :

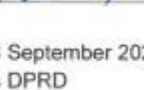
No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Sulitnya mencari Produk Hukum (Risalah Rapat)	Produk Hukum (Risalah Rapat) dapat disampaikan secara lengkap pada media publikasi	Tahun Anggaran 2026
2.	Tamu kunjungan harus menginap di Kabupaten Bantul	Penambahan persyaratan bagi tamu kunjungan kerja dari Kota/Kab lain	Tahun Anggaran 2026
3.	Persyaratan Layanan belum terpublikasi dengan baik	Dibagian standar pelayanan kepada calon tamu serta ditambahkan FAQ pada media publikasi website	Tahun Anggaran 2026
4.	Publikasi terkait dengan pembahasan peraturan daerah	Dapat diinformasikan proses pembahasan peraturan daerah yang dilaksanakan	Tahun Anggaran 2026
5.	Waktu pelayanan yang masih terlalu lama	Dilakukan Banmus jika memungkinkan dilakukan tidak hanya satu kali	Tahun Anggaran 2026

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten Bantul, 8 September 2026

No.	Nama & No HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Adam Sugiyanto, S.E	L	BPKPAD	
2.	Diana Setyawati R, SKM., MSE	P	Bappeda	
3.	Muhammad Rasyid Ridho, S.Tr.I.P	L	Bagian Organisasi	
4.	Sunarto, S.ST., M.H	L	Bagian PBJ	
5.	Deny A	L	Bagian Hukum	

Kabupaten Bantul, 8 September 2026
Sekretaris DPRD
Kabupaten Bantul


Anwar Nur Fahrudin, S.STP., M.Eng
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197910051998101002

LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DPRD

Desa Sekwan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta

Jl. Jendral Sudirman Nomor 85 Bantul 55711 Telp. (0274) 367417 Fax. (0274) 367200

Laman: <http://dprd.bantulkab.go.id>, Pos-el: sekwan.bantul@bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Selasa, 8 September 2026
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Bantul
Acara : Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik (FKP)

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ambar Rur F.	Sekwan	1
2	Anton V	Kabag	2
3	Ambar	Kabag	3
4	Rosnid Ridho	Bag Organisasi	4
5	Wanto	Kabag	5
6	Sri S	Kabag Perside	6
7	Anggara	Kabag	7
8	Mangarta Widi	Stat Setman	8
9	Indah Sri I.	JFP Setman	9
10	Huana Oda	Stat	10
11	Wahudi		11
12	Dang A	Bag Huk / Staf	12
13	Mahda Alga	Magang	13
14	Diana JR	Dekretir Bppk	14
15	Kaysha Syanda Araya	Mahasiswa	15
16	Prakanto	Kanibang RT & Aset	16
17	Choir H.S.	Staf	17
18	Artista Purnama Sari	Staf	18
19	Dedik Fatmaka	Staf	19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

PPTK Bagian Umum,

Anton Vektor, S.STP, M.Eng.
NIP.198104261999121001

LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DPRD

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦱꦼꦏꦼꦂꦠꦂꦶꦢꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jl. Jendral Sudirman Nomor 85 Bantul 55711 Telp. (0274) 367417 Fax. (0274) 367200
Pos-el: sekwan.bantul@bantulkab.go.id laman: <http://dprd.bantulkab.go.id>

Bantul, 4 September 2026

Nomor : B/600.2.14.1/01307/SETWAN/2026

Sifat : Biasa

Lamp : -

Hal : Undangan

Kepada Yth.

1. Sekretaris DPRD Kab. Bantul
2. Inspektur Inspektorat Bantul
3. Kepala Bappeda Kab. Bantul
4. Kepala BPKPAD Kab. Bantul
5. Kepala Bagian Hukum Setda Bantul
6. Kepala Bagian PBJ Kab. Bantul
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Bantul
8.

di Bantul

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 8 September 2026

Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Bantul

Acara : Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik (FKP)

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANTUL



Anwar Nur Fahrudin, S.STP., M.Eng

Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197910051998101002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN



LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DPRD
Jl. Jendral Sudirman Nomor 85 Bantul 55711 Telp. (0274) 367417 Fax. (0274) 367200
Pos-el: sekwan.bantul@bantulkab.go.id laman: <http://dprd.bantulkab.go.id>

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang telah ditandatangani pada Rabu, 16 Oktober 2024. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

No.	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.	Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk lebih mengembangkan kompetensi SDM di lingkungan Sekretariat DPRD. Hal ini penting agar pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Melakukan pelatihan rutin dan pengembangan kompetensi pegawai guna meningkatkan kapasitas SDM, disertai evaluasi kinerja secara berkala	Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan public untuk meningkatkan kompetensi	
2.	Mengoptimalkan layanan aspirasi masyarakat dengan meningkatkan penggunaan dan efektivitas aplikasi JARIMAS untuk memastikan masyarakat	Melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan aspirasi dan Sekretariat Bantul dapat merespons	Secara aktif melakukan sosialisasi aplikasi Jarimas melalui konten	

	mengetahui cara menggunakan aplikasi tersebut dan memastikan bahwa aspirasi mereka ditindaklanjuti secara tepat waktu	aspirasi tersebut secara cepat.	sosial media DPRD Bantul	
3.	Perlunya evaluasi melalui FGD (Focus Group Discussion) dan survei kepuasan masyarakat (SKM) menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih besar untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Tanpa umpan balik yang cukup, evaluasi layanan tidak akan dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan akurat.	Partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan akan diperkuat melalui survey kepuasan dan FGD, sehingga masyarakat lebih aktif memberikan masukan terkait pelayanan DPRD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai kebutuhan publik.	Mengoptimalkan pelaksanaan SKM kepada pengguna layanan serta memanfaatkan hasil survei sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.	

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten Bantul, 3 Juni 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Bantul



Anwar Nur Fahrudin, S.STP., M.Eng

Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197910051998101002